

Media Online	Jateng.jpnn.com
Tanggal	01 Agustus 2025
Wilayah	Kabupaten Kudus



Pemkab Kudus Berikan Dana Hibah kepada 10 Parpol, Sebegini Jumlahnya

<https://jateng.jpnn.com/politik/17232/pemkab-kudus-berikan-dana-hibah-kepada-10-parpol-sebegini-jumlahnya>

jateng.jpnn.com, KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, resmi menyalurkan bantuan dana hibah senilai Rp2,57 miliar kepada 10 partai politik (parpol) peraih kursi DPRD hasil Pemilu 2024.

Penyerahan dana dilakukan langsung di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (30/7), dengan harapan partai bisa lebih aktif menyelenggarakan pendidikan politik di tengah masyarakat.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengatakan dana hibah tersebut harus digunakan secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Dia juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam mendidik masyarakat agar lebih melek politik.

"Mudah-mudahan bantuan hibah ini bisa dikelola dengan baik dan mendorong kegiatan pendidikan politik yang positif," ujar Sam'ani.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus M. Fitrianto menjelaskan pencairan dana dilakukan setelah laporan keuangan masing-masing parpol diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan catatan.

Bantuan dana diberikan berdasarkan jumlah perolehan suara sah setiap partai dalam Pemilu DPRD 2024, yang dikalikan nilai bantuan sebesar Rp5.000 per suara. Besaran bantuan pun bervariasi tergantung perolehan suara masing-masing partai.

Berikut rincian bantuan dana hibah yang diterima partai politik di Kudus:

PDI Perjuangan: Rp533,26 juta

PKB: Rp429,1 juta

Partai Gerindra: Rp354,5 juta

Partai Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, PKS, PPP, Hanura juga mendapatkan bantuan dengan nilai sesuai perolehan suara masing-masing.

Fitrianto menambahkan dana hibah ini dapat digunakan untuk dua hal utama, yaitu operasional sekretariat partai dan kegiatan pendidikan politik.

Ketua DPC Partai Hanura Kudus, Muhammad Sutriyono, menuturkan bahwa pihaknya akan mengalokasikan 60 persen dana untuk kegiatan pendidikan politik seperti seminar atau diskusi publik, dan sisanya untuk kebutuhan operasional sekretariat.

"Tujuannya tentu agar masyarakat makin memahami pentingnya peran politik dalam kehidupan mereka," kata Sutriyono. (antara/jpnn)